

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Republik

Kata Republik dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Republik secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu “*Res*” yang artinya urusan dan “*Publica*” yang berarti public atau umum. Sehingga Republik secara sederhana yaitu mengandung konsep bahwa negara adalah milik bersama dari rakyatnya, dan pengelolaan pemerintahan seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pengertian dasarnya Republik adalah sebuah negara di mana pangkal pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan atau bangsawan. Dalam sistem republik, prinsip utama yang dianut adalah kedaulatan rakyat, di mana kebijakan dan hukum ditetapkan berdasarkan kehendak mayoritas warga melalui perwakilan atau mekanisme demokrasi langsung (Soehino, 2005).

Republik sering kali disandingkan dengan demokrasi, meskipun tidak semua republik bersifat demokratis jika pemerintahan tersebut tidak memberikan hak partisipasi yang adil kepada rakyatnya. Menurut para ahli, sistem republik dapat berbentuk beragam, seperti republik presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh, atau republik parlementer, di mana kepala negara lebih bersifat seremonial dan kekuasaan utama ada pada parlemen.

2.2 Perkembangan Gagasan republik: Plato – Revolusi Prancis

Konsep republik telah berkembang melalui berbagai tahap sejarah, mulai dari gagasan awal dalam filsafat Yunani kuno hingga realisasi politiknya dalam peristiwa besar seperti Revolusi Prancis

Plato memperkenalkan gagasan tentang republik dalam karyanya, *The Republic* (Plato, 2007), sekitar abad ke-4 SM. Dalam buku ini, ia menggambarkan sebuah negara ideal yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan. Plato membagi masyarakat ke dalam tiga kelas utama: penguasa (*philosopher-kings*), prajurit, dan produsen (pekerja dan pedagang). Baginya, republik adalah negara yang dikelola oleh para filsuf yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Meskipun konsepnya tidak demokratis menurut standar modern, gagasan Plato menekankan pentingnya pemerintahan yang berbasis pada kebajikan dan keadilan sebagai landasan negara yang ideal (Durant, 2008)

Aristoteles, murid Plato, mengembangkan kritik terhadap gagasan gurunya. Dalam (*Politics*, 2008) Aristoteles menilai bahwa sistem republik ideal Plato tidak realistis. Aristoteles lebih menekankan pada konsep negara campuran, yang menggabungkan elemen demokrasi dan oligarki. Baginya, republik terbaik adalah yang mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Gagasan Republik yang dikemukakan Plato merupakan model negara ideal yang mengutamakan keadilan melalui pembagian peran yang jelas dalam masyarakat. Konsep ini mencerminkan keinginan Plato untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di mana setiap individu menjalankan tugasnya sesuai kemampuan, dengan para filsuf sebagai pemimpin bijak yang memahami hakikat keadilan sejati.

Walaupun gagasan Plato sering dikritik karena dianggap utopis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, teorinya tetap memberikan pandangan berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang berbasis pengetahuan dan keadilan dalam kehidupan politik (Kraut, 2018)

Gagasan tentang republik memperoleh bentuk praktis dalam sejarah Romawi Kuno (509–27 SM). Republik Romawi adalah salah satu sistem pemerintahan pertama yang memberikan peran signifikan kepada institusi perwakilan seperti Senat. Meskipun kekuasaan masih berada di tangan elit aristokrat (patrician), republik Romawi memperkenalkan gagasan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari *res publica*, atau kepentingan bersama. Namun, sistem ini akhirnya runtuh dan digantikan oleh Kekaisaran Romawi, yang memusatkan kekuasaan pada seorang kaisar.

Pada masa Renaisans, gagasan republik klasik dihidupkan kembali oleh para pemikir seperti Niccolò Machiavelli. Dalam bukunya, (*Discourses on Livy*, 2006) Machiavelli menekankan pentingnya republik yang kuat dan stabil, yang memungkinkan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Ia juga memperkenalkan konsep *checks and balances* untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada abad ke-17 dan 18, gerakan Pencerahan di Eropa membawa gagasan republik ke arah yang lebih demokratis. Pemikir seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau mengembangkan ide-ide tentang hak asasi manusia, kontrak sosial, dan pemisahan kekuasaan. Rousseau, khususnya dalam (*The Social Contract* 2024), memperkenalkan gagasan tentang kedaulatan rakyat sebagai

landasan pemerintahan republik, Rousseau juga menyarankan bahwa republik adalah bentuk pemerintahan terbaik karena dalam republik, kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang berfungsi sebagai pemegang kedaulatan. Dalam republik, kekuasaan tidak berada pada individu atau kelompok tertentu, melainkan tersebar dan digunakan untuk kepentingan umum. Tokoh abad pencerahan lainnya yaitu, Montesquieu, dalam (*The Spirits Of Law* 2021) menggambarkan bahwa republik ideal adalah yang memiliki prinsip kebajikan dan kekuasaan yang terdistribusi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ide-ide ini memengaruhi pembentukan konstitusi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat.

Revolusi Prancis adalah puncak dari perkembangan gagasan republik, di mana konsep ini diwujudkan dalam bentuk konkret sebagai alternatif dari monarki absolut. Dipengaruhi oleh pemikir Pencerahan, para revolusioner menggulingkan Raja Louis XVI dan mendeklarasikan Republik Prancis pada 1792. M. Hatta Dalam bukunya (Hatta, 1987) Menyebutkan bahwa Revolusi ini menandai pergeseran dari sistem monarki tradisional menuju pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Meskipun masa awal republik penuh dengan tantangan, Revolusi ini memperkenalkan prinsip modern seperti hak universal, kesetaraan hukum, dan kedaulatan rakyat. Namun, periode ini juga diwarnai oleh ketidakstabilan, seperti Pemerintahan Teror dan munculnya Napoleon sebagai penguasa otoriter, Revolusi Prancis membangun fondasi bagi sistem republik modern yang demokratis.

Gagasan republik berkembang dari idealisme filosofis Plato menjadi sistem pemerintahan praktis yang diterapkan di berbagai negara. Dimulai dari fokus pada

keadilan dan kebajikan di Yunani Kuno, melalui eksperimen institusional di Republik Romawi, hingga menjadi simbol kedaulatan rakyat selama Revolusi Prancis, republik kini dikenal sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang paling banyak diterapkan di dunia.

2.3 Perkembangan Gagasan Republik Indonesia

Gagasan awal mengenai republik di Indonesia lahir dari pertemuan antara tradisi lokal dan pengaruh pemikiran politik Barat. Pada awal abad ke-20, pendidikan dan literasi yang meningkat di kalangan kaum terpelajar membuka ruang bagi masuknya ide-ide demokrasi, kebebasan, dan kedaulatan rakyat. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir terinspirasi oleh revolusi-revolusi besar di dunia, seperti Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika, yang menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam awalnya lebih berfokus pada perjuangan sosial, tetapi lambat laun menjadi platform untuk membicarakan visi politik, termasuk ide mengenai republik sebagai bentuk pemerintahan yang ideal bagi Indonesia merdeka. Pada masa penjajahan, pemikiran tentang bentuk negara republik mulai muncul di kalangan intelektual dan pejuang kemerdekaan yang terinspirasi oleh ide-ide demokrasi dan nasionalisme dari Barat. Tokoh seperti Tan Malaka, yang terpengaruh oleh gagasan materialisme Karl Marx, berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghidupkan potensi yang ada pada diri mereka (Suprianto, 2024).

Pada masa pendudukan Jepang, gagasan republik mendapat momentum melalui pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, perdebatan tentang dasar negara dan bentuk pemerintahan menjadi sangat intens. Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno adalah beberapa tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara berbentuk republik, dengan penekanan pada kedaulatan rakyat dan integrasi bangsa. Republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang mampu mengakomodasi keberagaman Indonesia sekaligus mempromosikan kesetaraan. Hasil perdebatan ini tercermin dalam Pancasila, yang menjadi landasan konstitusional negara Indonesia, dan konsep republik dipilih karena dianggap sesuai dengan cita-cita kedaulatan rakyat (Chryshna, 2020).

Puncak dari gagasan ini terwujud pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden dipilih sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang mencerminkan semangat demokrasi langsung dan kedaulatan rakyat. Keputusan ini mencerminkan hasil diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis mengenai pentingnya bentuk pemerintahan yang mendukung kebebasan politik, keadilan sosial, dan keutuhan bangsa. Penetapan republik menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju negara yang berdaulat dan mandiri (MKRI, 2015).

2.4 Konsep Republik Plato

Dalam konteks karya Plato, judul *Politeia* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *The Republic* atau dalam bahasa Indonesia sebagai Republik, merujuk pada ide negara ideal yang diatur berdasarkan prinsip keadilan, di mana setiap individu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam struktur masyarakat. Plato, dalam *Politeia*, tidak hanya membahas bentuk pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan peran pendidikan dalam membentuk warga negara yang baik.

Salah satu tokoh pencetus gagasan republik adalah Plato (424/423 - 348/347 SM) ia lahir di Athena, Yunani, dari keluarga bangsawan yang berpengaruh. Nama aslinya adalah Aristocles, tetapi ia dikenal dengan nama "Plato," yang mungkin berasal dari kata Yunani yang berarti "lebar," merujuk pada bahunya yang lebar atau cakupan pikirannya yang luas. Keluarganya memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin Athena, dan ia menerima pendidikan yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu, seni, dan sastra (Durant, 2008).

Konsep Republik yang dikemukakan oleh Plato dalam karyanya *The Republic* adalah salah satu gagasan politik paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Dalam teks ini, Plato menguraikan konsep negara ideal yang ia sebut sebagai "*kallipolis*" atau "kota terbaik." Teori ini didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap elemen dalam masyarakat berfungsi sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing untuk mencapai harmoni dan stabilitas negara. Pemikiran ini dipengaruhi oleh kondisi politik di Athena pada masanya, di mana demokrasi kerap dianggap oleh Plato sebagai sistem yang rentan terhadap

ketidakstabilan dan korupsi. Ia percaya bahwa bentuk pemerintahan terbaik adalah yang dipimpin oleh seorang filsuf, atau philosopher-king, karena hanya filsuf yang mampu memahami konsep keadilan dan kebaikan yang sejati. (Magnis-Suseno, 1999).

2.4.1 Struktur Masyarakat

Dalam konsep yang di kemukakan oleh Plato, ia membagi struktur masyarakat menjadi tiga kelas utama. Menurut pandangan Plato ke tiga kelas ini menjadi fondasi negara ideal karena setiap kelas memainkan perannya sesuai dengan keahlian dan sifat dasarnya. Harmoni antara ketiganya menciptakan keadilan, yang menurut Plato adalah inti dari tatanan sosial yang baik, yaitu: kelas Penguasa (Philosopher-Kings), kelas Penjaga (Auxiliaries), dan kelas Produsen.

1. Kelas Penguasa (Philosopher-Kings)

Dalam pandangan Plato, penguasa terbaik adalah seorang filsuf yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan untuk memimpin negara dengan adil. Filosof ini tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki kualitas moral yang tinggi, sehingga mereka dapat memimpin tanpa didasari oleh ambisi pribadi. Dalam sistem ini, penguasa dipilih bukan karena popularitas atau kekuasaan, melainkan berdasarkan kebijaksanaan dan kemampuan memahami konsep kebaikan yang absolut. Menurut Plato, hanya para filsuf yang dapat memahami *Form of the Good*, yang dianggap sebagai inti dari segala pengetahuan dan keadilan

2. Kelas Penjaga (Auxiliaries):

Kelas ini berfungsi sebagai penjaga negara yang tugasnya melindungi dan menjaga keamanan negara. Mereka dibentuk melalui pendidikan yang ketat untuk menanamkan nilai-nilai keberanian dan loyalitas terhadap negara. Kelas penjaga ini tidak memiliki harta pribadi agar tidak tergoda oleh kepentingan pribadi, dan mereka dilarang memiliki keluarga sendiri untuk memastikan dedikasi penuh terhadap negara. Plato percaya bahwa dengan demikian, kelas penjaga dapat fokus pada tugas mereka tanpa adanya konflik kepentingan.

3. Kelas Produsen:

Kelas ini terdiri dari para pekerja, pedagang, petani, dan seniman yang memenuhi kebutuhan ekonomi negara. Berbeda dengan kelas penguasa dan penjaga, kelas ini diizinkan untuk memiliki harta dan keluarga, karena mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik atau pertahanan negara. Menurut Plato, kelas produsen tidak memerlukan pendidikan moral atau filosofis yang ketat, tetapi mereka tetap harus menjalankan peran mereka secara efisien untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Plato berargumen bahwa keadilan terjadi ketika setiap orang menjalankan tugas yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya (principle of specialization). Filosof memimpin, penjaga melindungi, dan produsen memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam bukunya (Magnis-Suseno, 1999) menjelaskan Fondasi negara ideal menurut Plato ini adalah harmonisasi kelas yang menjalankan tugasnya sesuai kodrat. Keadilan tercapai bukan karena kesetaraan fungsi, melainkan karena setiap

kelas menjalankan tugasnya secara tepat. Inilah inti dari Republik Plato negara yang terstruktur baik dengan peran-peran yang saling melengkapi.

2.4.2 Keadilan

Keadilan, dalam konsep Republik Plato, didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap individu dan kelas menjalankan peran mereka dengan baik tanpa mencampuri tugas kelas lain. Prinsip ini disebut sebagai (*justice as specialization*), di mana setiap anggota masyarakat harus bekerja sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya masing-masing. Plato percaya bahwa keadilan hanya dapat dicapai ketika setiap orang melakukan peran yang sesuai dengan sifat dan bakatnya.

Plato mengungkapkan bahwa negara muncul karena keinginan dan kebutuhan manusia, oleh karenanya negara dibentuk oleh manusia dan untuk semua manusia. Sesuai dengan ajaran Plato, tujuan dari negara sangat sinkron dengan tujuan hidup manusia, yakni untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan seluruh warga negara. Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, salah satu pokok persoalan dalam negara adalah jaminan keselamatan semua orang, baik diperintah ataupun yang memerintah. Orang yang memerintah sangat diharuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan yang diperintahnya. Dengan demikian negara ideal adalah negara yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan. Dengan pemikirannya itu, pada akhirnya Plato berpandangan bahwa negara haruslah berporos pada keadilan, kearifan, keberanian, dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan hidup bernegara.

Lebih lanjut Plato dalam bukunya (Plato, 2007), juga mengkritik berbagai bentuk pemerintahan yang ada pada masanya, termasuk demokrasi, tirani, oligarki, dan timokrasi. Menurut Plato, semua bentuk pemerintahan ini memiliki kelemahan karena tidak mampu menciptakan keadilan atau mencapai tatanan ideal yang harmonis. Plato, seperti dijelaskan dalam buku (Kaelan, 1991), mengkritik demokrasi dan bentuk pemerintahan lainnya karena cenderung melupakan prinsip keadilan yang sejati. Namun, gagasan Plato tentang kallipolis lebih merupakan ideal normatif daripada solusi praktis. Kritiknya mengingatkan bahwa setiap sistem pemerintahan harus diimbangi dengan kebajikan, keadilan, dan pemimpin yang kompeten. (Nurhayati, 2022).

2.4.3 Pendidikan Sebagai Fondasi

Untuk mencapai hal-hal tersebut tentunya Plato juga mementingkan pendidikan sebagai fondasi utama bagi terciptanya negara ideal. Menurutnya, pendidikan membentuk karakter dan kecerdasan individu untuk menjalankan perannya dalam masyarakat. Bagi Plato, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan moral dan intelektual, yang bertujuan menciptakan pemimpin bijaksana (filosof-raja) dan warganegara yang adil. Pendidikan ini dimulai sejak usia dini dan terus berkembang, dengan tujuan akhirnya untuk membentuk pemimpin yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan moralitas tinggi. (Kaelan, 1991).

Dalam ajaran Plato, pendidikan merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan pendidikan, orang-orang akan mengetahui apa yang benar dan tidak benar, yang baik dan yang jahat, yang patut

dan yang tidak patut. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan setiap individu dan melatihnya sehingga ia akan menjadi seorang warga negara yang baik, dalam suatu masyarakat yang harmonis, dan melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien. Plato menekankan perlunya pendidikan direncanakan dan diprogramkan sebaik-baiknya agar mampu mencapai sasaran yang diidamkan. Dengan pendidikan, negara mengadakan motivasi, semangat loyalitas, kebersamaan dan kesatuan cinta akan kebaikan dan keadilan. (Jandung, 2022).

2.5 Pemikiran Politik

Pemikiran politik merupakan cabang dari ilmu politik yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap ide-ide serta konsep-konsep yang berkaitan dengan politik, mulai dari era Yunani Kuno hingga masa kini. Bidang ini sangat terkait dengan sejarah, filsafat politik, etika, moralitas, dan idealisme politik secara umum. Pemikiran politik mencakup berbagai pertanyaan mengenai bagaimana negara seharusnya diatur, siapa yang berhak memegang kekuasaan, bagaimana sistem pemerintahan dibentuk, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem politik yang ada dalam suatu masyarakat. *Political thought* juga bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik semenjak dahulu kala di masa Yunani Kuno sampai sekarang

Pemikiran politik merupakan gagasan-gagasan politik seseorang yang didalamnya mengandung nilai-nilai dan norma-norma, dalam pemikiran politik terdapat gagasan-gagasan politik yang hendak diwujudkan. Ada beberapa hal yang

mempengaruhi pemikiran politik seseorang diantaranya lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, serta latar belakang keturunan atau keluarga. Pemikiran politik sangat terkait erat dengan sejarah dan filsafat politik. (Rozak, 2022).

Pada dasarnya, pemikiran politik bertujuan untuk memahami berbagai aspek kekuasaan dan pengaturannya dalam konteks sosial dan historis. Melalui kajian ini, kita dapat menggali bagaimana ide-ide tentang negara dan kekuasaan berkembang seiring waktu, dan bagaimana berbagai pemikir atau teoritikus politik memberikan solusi atau pandangan mereka mengenai masalah sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. (Rozak, 2022).

2.6 Hermeneutika Ricouer

Hermeneutika adalah teori tentang pemahaman dalam menafsirkan teks, Dimana gagasan kuncinya adalah realisasi diskursus mengenai teks. Tugas hermeneutika adalah menemukan makna. Makna di sini berarti makna hidup atau setidaknya mencari artinya dalam kehidupan. Hermeneutika didasarkan pandangan dunia yang melihat bahasa sebagai medium yang menyampaikan banyak makna, di antaranya adalah makna filosofis. (Baghi, 2012).

Hermeneutika melihat dunia yang terhubung dengan manusia melalui mediasi teks. Karena kita tidak melihat dunia secara langsung tetapi melalui teks. Teks yang melihat dunia keseluruhan bukannya unit linguistik sendiri-sendiri yang digabungkan menjadi satu. Bukan berarti bahwa sebuah masyarakat atau kebudayaan yang belum bisa baca-tulis atau buta huruf tidak bisa mengerti dunia. Sebagai metode, hermeneutika mampu mempraktikkan dirinya kepada budaya

dongeng lisan sama halnya dengan masyarakat yang sudah berbudaya baca-tulis (Laksana, 2023).

Makna yang terungkap pada cara menafsir seperti itu adalah makna intensionalitas. Intensional ini diambil berdasarkan pemikiran filosofis yang membebaskan maksud pengarang, dan termotivasi dengan sikap percaya atas teks. Itulah lingkaran hermeneutika – bahwa kita harus percaya dalam rangka memahami. Dan akan menjadi lingkaran yang baik ketika kita bertaruh bahwa pemahaman saya itu akan memperkuat keyakinan saya dan sebaliknya (Sungkar, 2023).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan untuk membedakan antara penelitian yang akan dikaji. Manfaat dari penelitian terdahulu ialah agar mengetahui bagaimana hasil yang sudah ditemukan dan dikaji di dalam penelitian terdahulu. Dengan hal ini, berdasarkan penelusuran dalam pengetahuan ini, peneliti telah mendapatkan temuan dari beberapa peneliti terdahulu serta kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Yaitu di antaranya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
Argo Singgih Pratama (2019)	Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka Dan Relevansinya Di Indonesia	Tan Malaka yang menolak kapitalisme di Indonesia, negara mempunyai hak untuk mengambil kembali alat produksi yang telah dirampas bangsa asing dan memberikan alat produksi tersebut kepada rakyat. Tan Malaka menginginkan kemerdekaan Indonesia 100%, dalam pandangan politiknya Tan Malaka menginginkan Indonesia menganut ideologi sosialisme untuk menjalankan politik ekonorni dan pada kapitalisme, ia menganggap sosialismelah cocok dengan kondisi kultur dan pemikiran rakyat Indonesia.	Subjek penelitian yang sama yakni sama-sama mengenai pemikiran Tan Malaka.	Penelitian ini berada pada objek penelitian yang berbeda. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai politik ekonomi.
Fatur Rahman Asrul Tahun (2018)	Negara Dalam Pemikiran Tan Malaka	Negara hasil dari terbentuknya pertentangan kelas-kelas sosial yang tak dapat didamaikan. Negara muncul akibat pertentangan di dalam kelas-kelas masyarakat, dibangunnya negara (kekuasaan) membuat	Subjek penelitian yang sama yakni sama-sama mengenai pemikiran Tan Malaka.	Objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini membahas mengenai Negara dalam

		pertentangan kelas menjadi tidak sia-sia. Menurut Tan, membangun negara ideal adalah negara yang berbentuk republik, bukan republik yang berasaskan <i>Trias Politica</i>, akan tetapi negara Republik yang dikelola oleh sekelompok organisasi tunggal. Dan negara yang merdeka, ialah negara yang tidak mengancam kepada bangsa negara lain, dan negara yang terbebas dari ancaman dan kekangan oleh bangsa sendiri		pemikiran Tan.
Ardy Arfian (2015)	Pandangan Politik Tan Malaka Tentang Konsep Negara Republik	Penelitian ini menggunakan kajian historik (sejarah), serta pendekatan multidimensional. Tahapan dalam kajian historik adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil dari pembahasan adalah Pandangan politik Tan Malaka tentang Negara Republik yang berkaitan dengan Revolusi Pra Kemerdekaan meliputi (1) Seluruh rakyat harus memiliki jiwa nasionalis yang berkobar-kobar, (2) Memberikan pendidikan kepada	Subjek penelitian yang sama yakni sama-sama mengenai pemikiran Tan Malaka.	Objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini membahas mengenai konsep negara republik menurut pemikiran Tan Malaka secara garis besar.

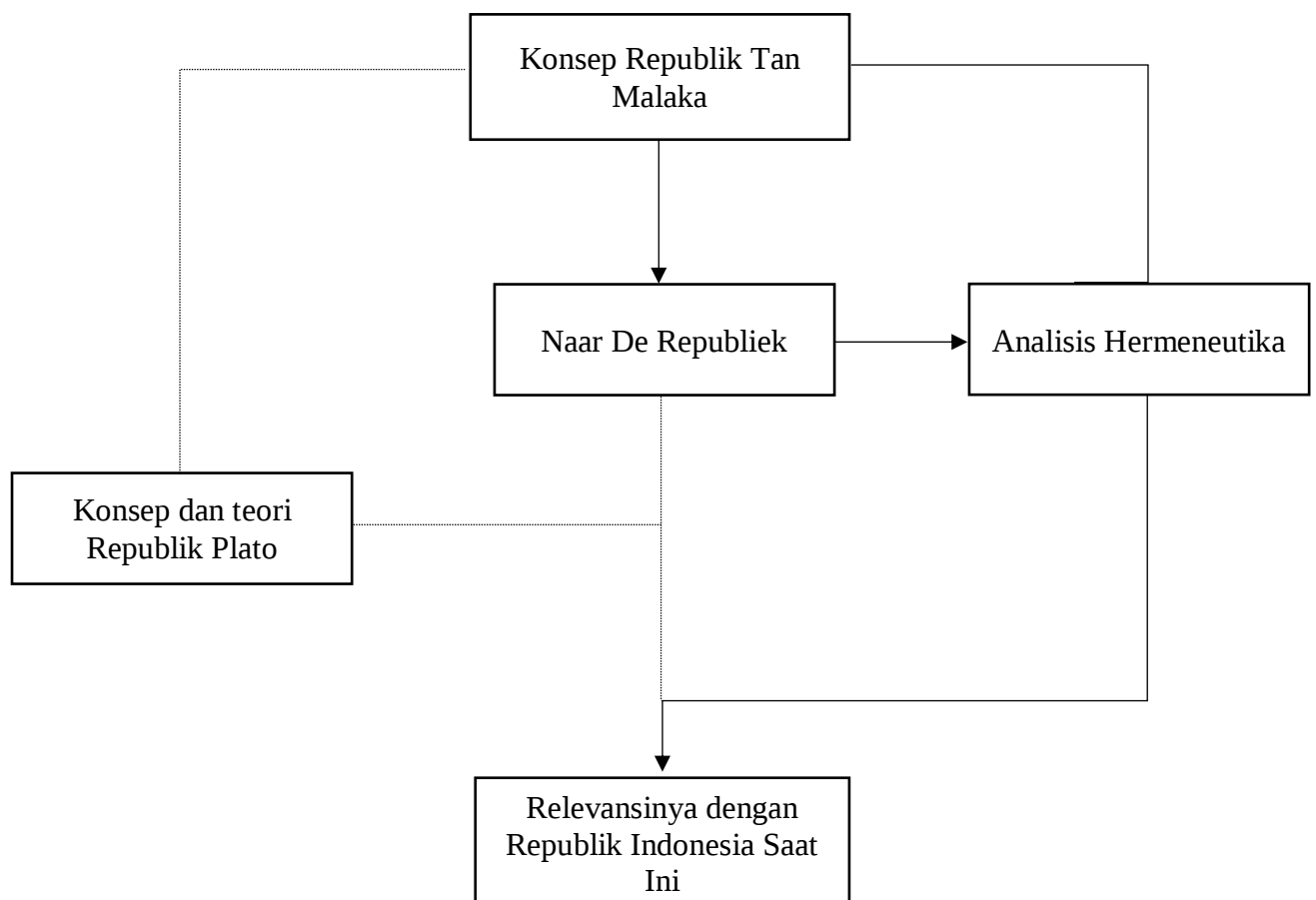
		Rakyat Indonesia, (3) Sistem politik untuk membentuk negara republik dengan persatuan (Menggagas Persatuan Indonesia), (4) Menjalankan sistem politik dengan melakukan pergerakan, tindakan dan berani melakukan perubahan dari hal yang mendasar, (5) Penerapan strategi politik “massa aksi” sebagai pengerahan kekuatan rakyat. Sedangkan pandangan politik Tan Malaka yang berkaitan dengan Revolusi Pasca Kemerdekaan yaitu bertindak tegas melawan penjajah dengan kekuatan rakyat penerapan kembali strategi Massa Aksi dan dengan cara bergerilya.		
--	--	---	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini secara mendalam terkait dengan gagasan republik yang ideal dalam pemikiran Tan Malaka. Dan mengetahui relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan republik tan malaka dengan kondisi republik Indonesia saat ini.

2.8 Kerangka Pemikiran

Dalam (Sugiyono, 2016) menjelaskan mengenai Kerangka Pemikiran yang berada di dalam penelitian ilmiah. Kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Tan Malaka (1897 – 1949) adalah seorang intelektual Indonesia dan seorang pahlawan revolusioner Indonesia, yang menginginkan negara Indonesia adalah negara sosialis. Pemikiran dan gagasan beliau terkait Negara yang ia impikan dia mengusulkan Republik yang menurutnya ideal bagi negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan Hermeneutik, dengan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif.

Konsep utama yang peneliti gunakan adalah konsep Republik Plato yang mempunyai tiga ide utama terkait dengan struktur masyarakat, keadilan dalam negara, dan pendidikan menjadi fondasi utama untuk negara yang ideal. Ide-ide ini menjadi alat untuk menampung data dan sebagai alat teoritis untuk menstrukturkan dan menginterpretasikan gagasan republik Tan Malaka secara sistematis. yang berada dalam beberapa sumber yang akan dianalisis terlebih dahulu menggunakan hermeneutika dan akan dikaitkan dengan relevansinya terhadap republik Indonesia saat ini.